

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Serangan 11 September 2001 yang menghancurkan WTC dan mengakibatkan kerusakan serius pada Pentagon memicu reaksi keras dari pemerintah Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat hanya beberapa bulan setelah serangan 11 September 2001 ke Afghanistan telah memunculkan spekulasi berbagai pihak mengenai motivasi di balik tindakan tersebut. Masyarakat internasional, termasuk masyarakat berlatar budaya Islam merespons hal ini, antara lain, dengan mengeluarkan berbagai komentar dan analisis terhadap motivasi negara adidaya itu. Pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat bahwa kampanye yang sedang mereka jalankan bertujuan untuk melenyapkan organisasi teroris al-Qaeda serta meringkus pemimpinnya Osama bin Laden yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September dianggap tidak lebih dari alasan permukaan.¹ Sebagian kalangan berpendapat bahwa motivasi sesungguhnya dari invasi tersebut adalah penguasaan atas sumber daya minyak dan gas bumi Afghanistan, yang baru saja ditemukan beberapa dekade terakhir. Sementara itu sebagian masyarakat khususnya di negara berkultur Islam secara umum justru menganggap bahwa serangan tersebut dilatari oleh lebih dari sekedar kepentingan ekonomi ataupun politik belaka, namun lebih luas lagi, yakni kebencian entitas “Barat”, yang dalam hal ini merujuk kepada Amerika Serikat, terhadap entitas “Islam”, yang berakar dari konflik historis yang dalam selama berabad-abad.² Anggapan ini merupakan sesuatu yang signifikan bagi dunia Islam, yang terbukti dari reaksi seragam banyak umat Islam di seluruh dunia. Sejumlah ormas Islam dan organisasi politik Mesir, misalnya, menganggap apa yang dilakukan AS terhadap Afghanistan pasca serangan WTC hanya merupakan sasaran antara yang pada gilirannya akan merambah terhadap semua wilayah Islam selain

¹ Steve Niva, *Between Clash and Co-optation: US Foreign Policy and the Specter of Islam*, (Middle East Report, No.208, Middle East Research and Information Project,1998), hlm.1.

² Dr. Muhammad ‘Abbas. *Bukan, Tapi Perang terhadap Islam* (terj. Ibnu Bukhori), (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2004), hlm.21.

Afghanistan. Permusuhan dan peperangan yang dikobarkan AS tidak lain merupakan kelanjutan dari Perang Salib terhadap Islam dan akan terjadi ke berbagai wilayah yang memiliki potensi Islam tertentu. Sikap ini terutama diperlihatkan oleh organisasi-organisasi seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin, Hizbul Amal dza Tawajjuh Islami dan Hizbu Syariah.³ Majdi Ahmad Hussain, Sekjen Hizbul Amal Mesir bahkan menegaskan bahwa peperangan yang tengah dikobarkan AS tidak lain adalah kelanjutan Perang Salib terhadap Islam. "Ini Perang Salib. Amerika sengaja mencampurkan antara terorisme dan Islam untuk menggempur Islam. Kita sekarang berada di ambang Perang Salib, yang merupakan perpanjangan perang terhadap Irak, Sudan dan Afghanistan dengan rudal, serta embargo terhadap Iran, Libia dan Somalia."⁴ Lebih lanjut, serangan AS terhadap Afghanistan dianggap sebagai serangan terhadap umat Islam secara kolektif oleh sebagian umat Islam. Yusuf Qardhawi, seorang ulama Mesir, mengajak umat Islam untuk membantu kaum Muslim Afghanistan maupun negara lainnya untuk menghadapi permusuhan dengan AS ini, sebagaimana umat Islam dahulu bersatu menghadapi tentara beruang merah Uni Soviet.⁵ Osama bin Laden sendiri, tokoh yang disinyalir merupakan dalang dari serangan 11 September, ketika ditanya pandangannya mengenai serangan AS terhadap Afghanistan menyatakan bahwa "tidak diragukan lagi bahwa serangan barbarik ini membuktikan bahwa Inggris dan AS telah bertindak demi kepentingan Israel dan Yahudi, yang membukakan jalan bagi mereka untuk dapat memecah-belah Dunia Islam sekali lagi dan memperbudak mereka serta mencuri sisa kekayaan yang masih ada."⁶

Argumen terakhir khususnya merupakan titik tolak yang menjadikan penelitian ini menjadi penting untuk dibahas. Pandangan bahwa fenomena Perang Afghanistan merupakan suatu perang berlatar identitas/kultur/agama menyebabkan tersebarnya rasa paranoid antara kedua belah pihak (Islam dan Barat) dan jika hal seperti ini terus berlanjut dan terjustifikasi, maka hal itu beresiko memunculkan suatu konflik dalam skalanya yang lebih luas; sesuatu yang tentunya tidak boleh terjadi.

³ ES. Soepriyadi, *Perang Salib Jilid Dua-Wajah Dunia Pasca Kiamat Kecil Amerika Serikat*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Penelitian Dunia Islam Sinergi, 2001), hlm. 147.

⁴ *Ibid*, hlm. 149.

⁵ *Ibid*, hlm. 156.

⁶ Ahmad Dumyathi Bashori (Ed.), *Osama bin Laden Melawan Amerika*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hlm. 149.

Argumen berbasis identitas tadi sejalan dengan -dan hingga skala tertentu terjustifikasi oleh- prediksi seorang ilmuwan politik Harvard bernama Samuel Huntington, yang pada tahun 1993 mengeluarkan tesis yang ia sebut sebagai “*The Clash of Civilizations*”. Tesis ini menyatakan bahwa pasca Perang Dingin, dunia akan terbagi-bagi tidak berdasarkan ideologi lagi (dalam hal ini merujuk kepada Marxis vs Kapitalis, dsb.), namun berdasarkan identitas dalam skalanya yang terbesar, yakni peradaban. Ia membagi dunia ke dalam delapan peradaban besar, yaitu peradaban Cina, Jepang, Hindu (India), Islam, Barat, Ortodox, Amerika Latin dan Afrika.⁷ Dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, ia berargumen bahwa sumber utama konflik dunia tidak lagi faktor ekonomi maupun ideologi, namun identitas, dan konflik-konflik ini akan terjadi pada *fault-lines*, yakni salah satu entitas dari suatu peradaban dengan entitas dari latar belakang peradaban lainnya (jadi tidak serta merta harus seluruh entitas peradaban dilibatkan). Menyikapi potensi hal ini, ia berargumen bahwa Barat khususnya Amerika Serikat harus mewaspadaikan dan melakukan langkah-langkah antisipasi atas peradaban-peradaban lain yang amat potensial menciptakan “benturan”, dengan calon utama adalah Islam. Meskipun Huntington tidak menafikkan bahwa akan ada peradaban-peradaban lain yang menjadi pesaing, seperti India, dan Cina, namun menurutnya yang paling bersifat “*hostile*” terhadap Barat adalah Islam.⁸ Terdapat argumen yang secara esensial menyetujui tesis tersebut, walau dengan sudut pandang yang berbeda. Adian Husaini misalnya, meyakini bahwa benturan peradaban adalah sesuatu yang diciptakan dan dipromosikan oleh Huntington (sebagai bagian dari kaum neokonservatif) agar Barat dengan segera melakukan *pre-emptive strike* terhadap Islam. Husaini juga melihat bahwa penamaan ‘teroris’ adalah bagian dari kampanye ini, yang merupakan “kampanye lanjutan” terhadap musuh besar AS yang dahulu adalah Soviet/komunisme.⁹ Sejalan dengannya, penulis kontroversial Salman Rushdie bahkan juga meyakinkan bahwa ini memang tentang Islam (“*yes, this is all about Islam*”), khususnya merujuk pada apa yang

⁷ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York: Schuster Ltd., 1997), hlm. 45-46.

⁸ *Ibid*, hlm. 72-76

⁹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 131-147.

disebutnya kaum “Islamis”, yakni kaum muslim yang memiliki agenda politik untuk menjadi kelompok dominan yang berkuasa.¹⁰ Lebih lanjut, Dr. Muhammad Abbas dalam bukunya “Bukan, Tapi Perang terhadap Islam” kembali menambah deretan argumen yang memandang bahwa serangan Amerika Serikat ke Afghanistan adalah salah satu langkah kecil dari permainan besarnya untuk mendominasi dunia dan menghancurkan Islam. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan imperialis Amerika Serikat tidaklah dilatari oleh kepentingan ekonomi, namun murni karena kebencian terhadap suatu entitas penyaing peradaban Barat selama berabad-abad yang bernama Islam.¹¹

Sementara itu di sisi yang berlawanan, ada pula pihak-pihak yang tetap berkeyakinan bahwa konflik tersebut, sebagaimana banyak konflik lainnya di dunia ini, tidak lebih dari konflik *inter-state* (antar negara) yang dilatari kepentingan ekonomi dan politik. Ide mengenai kemungkinan adanya peranan budaya/identitas/peradaban dalam suatu konflik, terutama dalam skala besar, dianggap sebagai sesuatu yang absurd. M. Shahid Alam, seorang profesor ekonomi dari Northeastern University mengatakan bahwa tesis ini tidak relevan, bahkan setelah terjadinya invasi AS terhadap Afghanistan dan Irak, karena hanya menyajikan suatu pandangan paranoid dan sesungguhnya telah dibantah oleh maraknya demonstrasi di seluruh dunia yang menolak adanya perang (ia menyebut angka 30 juta orang selama tahun-tahun serangan), yang menurutnya akan membuat ketakutan bagi para ‘penggila perang’.¹² Dalam rangka menentang pandangan pertama tadi, John L. Esposito menyatakan bahwa ancaman Islam hanyalah sebuah mitos; yang ada adalah tantangan Islam. Karenanya, “kebijakan Barat terhadap kebangkitan Islam amatlah menyesatkan, juga merugikan kepentingan jangka panjang Barat sendiri, yang disebabkan kebodohan dan kesalahpahaman.”¹³ Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh PBB misalnya, berkenaan dengan konflik Israel-Palestina hingga konflik Amerika Serikat

¹⁰ <http://www.nytimes.com/2001/11/02/opinion/02RUSH.html?ex=1233723600&en=a2f3d913babef792&ei=5070>, diakses pada hari Selasa, 4 Februari 2009 pukul 21.00.

¹¹ Dr. Muhammad ‘Abbas. *Bukan, Tapi Perang terhadap Islam* (terj. Ibnu Bukhori), (Solo: Wacana ilmiah Press, 2004), hlm.22-24.

¹² <http://www.mediamonitors.net/mshahidalam2.html> , diakses pada hari Selasa, 4 Februari 2009 pukul 20.00.

¹³ *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*, dalam *Islamika- Jurnal Dialog Pemikiran Islam* No.2, Oktober-Desember 1993, hlm.38.

dengan Afghanistan dan Irak (contoh-contoh “baik” yang dapat menjustifikasi pandangan Huntington) menyatakan dengan tegas bahwa “tidak ada yang dinamakan benturan peradaban (*“there is no clash of civilizations”*). Walaupun demikian, laporan tersebut juga mengakui bahwa tindakan administrasi Bush pasca serangan Al Qaeda terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001, yang kemudian “dijadikan sebagai salah satu justifikasi untuk invasi atas Iraq, yang hubungannya tidak pernah ditunjukkan secara jelas, menciptakan persepsi bagi masyarakat Muslim bahwa agresi yang tidak adil ini berasal dari Barat.”¹⁴

Bagaimanapun, penulis melihat bahwa dunia pasca Perang Dingin dengan segala fragmentasinya memiliki pola hubungan yang lebih kompleks dan tidak sedeterministik yang dibayangkan oleh Huntington, pun tidak pula sebagaimana yang diyakini oleh pandangan yang menyatakan ekonomi-politik sebagai satu-satunya faktor determinan. Efek globalisasi yang membuat arus demografi hingga informasi menjadi lebih dinamis dari sebelumnya hingga interdependensi ekonomi yang tercipta karenanya, menjadikan suatu fenomena besar terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling bercampur-baur. Namun di sisi lain, penulis juga memandang tesis Huntington tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama karena respons dari banyak komponen masyarakat internasional atas suatu fenomena yang acapkali merujuk pada ide-ide inti dari tesis tersebut (peradaban). Dengan kata lain, benar atau salah, disetujui atau tidak, tesis tersebut telah menginfiltrasi pola pikir sebagian kalangan dan itu berarti tesis tersebut telah “eksis” dalam realita. Walau demikian, adalah realita pula bahwa kedua negara yang diserang oleh Amerika Serikat adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah (minyak dan gas), dan ini membuka peluang untuk pandangan berorientasi ekonomi-politik untuk menjadi relevan. Berdasarkan asumsi inilah penulis bermaksud menganalisis faktor-faktor penyebab serangan Amerika Serikat terhadap negara-negara tersebut di atas dengan memperhatikan berbagai hal/wacana yang kiranya dapat turut berkontribusi menjelaskan –meskipun tidak meliputi seluruhnya- fenomena serangan Amerika Serikat ini secara lebih berimbang.

¹⁴ <http://www.csmonitor.com/2006/1114/p07s01-wogi.html>, diakses pada hari Selasa, 4 Februari 2009 pukul 20.17.

I.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Mengapa Amerika Serikat menyerang Afghanistan pada tahun 2001?

I.3. Asumsi Penelitian

- Suatu fenomena internasional dapat terjadi karena berbagai macam sebab dari berbagai dimensi yang berbeda.
- Faktor politik-ekonomi maupun identitas/kultural/peradaban memiliki signifikansi dalam menentukan arah suatu fenomena dalam skala tertentu.

I.4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan pada tahun 2001 dalam suatu sudut pandang alternatif yang tidak bersifat monokausal, yakni menjadikan satu faktor (atau ranah faktor) menjadi satu-satunya determinan yang memicu suatu fenomena, namun multikausal, di mana berbagai faktor dari berbagai ranah dianggap memiliki peran signifikan, meskipun pada skala berbeda pada setiap kasusnya, dalam setiap fenomena. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan fenomena serangan AS tersebut dari sudut pandang yang lebih luas dan berimbang.

Sementara signifikansi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi studi hubungan internasional, khususnya dalam kaitannya dengan tinjauan geopolitik dan identitas/kultur/peradaban sebagai salah satu variabel analisis. Hal ini hemat penulis akan cukup memberikan masukan berarti khususnya untuk memberikan referensi tambahan pada tipe analisis-analisis atas fenomena internasional yang selama ini seringkali didominasi oleh analisis monokausal belaka.

I.5. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan digunakan teori yang menjelaskan suatu fenomena tidak secara monokausal, namun lebih kepada multikausal. Teori yang digunakan adalah

teori geopolitik Aymeric Chauprade, seorang Profesor Geopolitik Internasional dari *International College of Defense* Paris, dan Universitas Sorbonne, yang memasukkan dua kelompok besar faktor umum yang selama ini seringkali diyakini secara parsial, yakni faktor politik-ekonomi maupun faktor identitas. Teori Chauprade menekankan pada multikausalitas dari sebuah fenomena internasional, dengan pertimbangan/strategi geopolitik sebagai landasannya.

Geopolitik dalam definisi Chauprade¹⁵ adalah **hubungan politik antara tiga jenis kekuasaan (*power/pouvoir*), yakni kekuasaan negara (*state*), kekuasaan intra-state/dalam negara (seperti gerakan separatis, pemberontakan, dsb.), dan kekuasaan *trans-state*/lintas negara (jaringan kriminal, jaringan teroris, perusahaan multinasional, dsb.), dengan faktor geografi fisik (situasi wilayahteritori, karakteristik wilayah), dari geografi identitas (atau geografi populasi), serta geografi sumber daya (*resource*). Ia menegaskan pula bahwa geopolitik dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan karakter objektif dari geografi fisik dan manusia yang mengkondisikan pilihan-pilihan strategis aktor internasional dalam lapangan ideologis, politik dan ekonomi pada skala global.**

Selanjutnya terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam geopolitik, yakni:

Pertama, geopolitik yang berangkat dari realita kekuasaan, secara esensial mengacu pada negara, dan juga para aktor yang seringkali merepresentasikan tantangan terhadap negara: para aktor *intra-state* seperti gerakan separatis, aktor *trans-state*, seperti jaringan ekstrimis keagamaan. Acuan utama dalam geopolitik dimensi ini adalah negara dan permasalahannya, dan pemahaman mengenai ancaman terhadap negara, baik dari dalam (yang muncul dari masalah identitas dalam segala bentuknya), dan juga dari luar (tuntutan negara tetangga, atau imperialisme dari negara adikuasa), atau suatu kondisi yang timbul dari kombinasi faktor eksternal maupun internal (seperti jaringan lintas negara yang memiliki pengaruh dan dampak di dalam maupun luar negeri).

¹⁵ Aymeric Chauprade, *Géopolitique, Constantes et changements dans l'histoire*, (Paris: Ellipses, 2007), hlm. 16-17.

Dimensi kedua: pendekatan geopolitik bersifat multi-kausal. Sebuah analisis atas suatu negara maupun sebuah wilayah geografis tidak dapat direduksi hanya pada satu faktor belaka: tidak pernah terjadi suatu masalah muncul hanya disebabkan murni oleh faktor etnis ataupun agama.¹⁶

Dimensi ketiga: Pendekatan geopolitik yang ditawarkan oleh Chauprade pada dasarnya bersifat kulturalis (memperhatikan faktor kebudayaan/identitas). Itu berarti pendekatan ini menekankan pentingnya faktor budaya dalam mempengaruhi sejarah dan juga fakta bahwa banyak identitas nasional yang pada awalnya merupakan budaya nasional. Dapat diambil sebagai contoh, dan mungkin tidak ada yang lebih tepat lagi: Amerika Serikat. Amerika Utara selama dua ratus tahun terakhir adalah sebuah koloni kaum Protestan mesianik kulit putih. Koloni-koloni mereka inilah yang kemudian menciptakan budaya nasional Amerika, yang saat ini terkenal dengan sebutan WASP (*White Anglo-Saxon Protestant*). Kemudian koloni tersebut sedikit demi sedikit bertarnsformasi menjadi sebuah bangsa migran. Namun demikian, para migran ini di tempat asal mereka telah sejak awal mengadopsi suatu semangat WASP yang serupa. Dengan demikian, Amerika sesungguhnya didirikan oleh para misionaris fundamentalis Protestan maupun Freemason yang kemudian mewariskan kepada keturunan mereka, dan juga para migran lain yang datang belakangan dan diterima oleh para keturunan ini, sebuah semangat misionaris. Jika kita tidak memahami dimensi sejarah Amerika yang satu ini, yang mana telah membentuk semangat bangsa Amerika saat ini, maka kita tidak akan pula dapat memahami **makna dari politik global yang dijalankan Amerika Serikat kini.**¹⁷

Hingga titik tersebut Chauprade memperlihatkan keyakinannya bahwa dimensi identitas, yang dalam hal ini ia rujuk kepada budaya, turut membentuk pola kebijakan suatu negara pada suatu masa. Namun perlu ditekankan sekali lagi bahwa peran identitas

¹⁶ Ia mengajukan contoh konflik Maluku yang beberapa tahun lalu seringkali diinterpretasikan di Barat sebagai sebuah konflik agama murni, yakni Kristen melawan Islam. Sebuah analisis ilmiah yang muncul kemudian, bertentangan dengan analisis pertama, memperlihatkan bahwa sesungguhnya konflik tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, dan memperlihatkan kompleksitas dari berbagai perpecahan: perpecahan antara pusat dan periferi, perpecahan antara Muslim dan Kristen, perpecahan antara golongan keagamaan moderan dan ekstrimis, kaum elit tradisional dan modern, separatistis dan pendukung kesatuan, etnis Maluku dan non-Maluku, dan sebagainya.

¹⁷ Aymeric Chauprade, *Pendekatan Baru dalam Geopolitik dan Penerapannya dalam Perubahan Dunia*, dalam Policy Review, Jurnal Center for Indonesian Reform Vol.1/Th I/Januari-April 2008, hlm.3-6.

dalam pembentukan suatu fenomena tentunya tidaklah sedeterministik apa yang diyakini oleh Huntington.

Menurut Chauprade, konflik, yang merupakan bagian dari geopolitik pada intinya disebabkan oleh tiga sumber mendasar:¹⁸

- a. upaya mengendalikan sumber daya. Pada abad kedua puluh dan sebagaimana sepanjang sejarah, pertarungan memperebutkan hal ini umumnya ditutupi dengan legitimasi ideologi (misalnya: perang Amerika Serikat melawan komunisme hingga runtuhnya Soviet pada awal 1990, maupun peperangan yang dilakukan Soviet dengan alasan komunisme), walau pada hakikatnya tujuan utamanya adalah mengendalikan sumber daya alam (minyak, uranium, air, berlian). Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menjamin keberlangsungan suatu entitas. Kriteria sumber daya ini berbeda pada setiap masa di setiap tempat. Pada abad-abad terdahulu sebelum revolusi industri, misalnya, sumber daya utama yang diperebutkan bangsa-bangsa adalah tanah yang subur, produksi langsung dari tanah tersebut seperti bahan pangan utama (*staple food*) hingga rempah-rempah (*spices*), yang pada saat itu merupakan komoditi primadona di pasar internasional. Seiring dengan hal itu, barang-barang tambang yang berfungsi sebagai alat tukar (emas, perak dan perunggu) melengkapi daftar sumber daya yang diperebutkan bangsa-bangsa.

Pasca revolusi industri, dunia menyadari bahwa minyak dan gas adalah sumber energi utama yang dapat memajukan perekonomian dan kekuatan militer suatu negara yang pada gilirannya akan meningkatkan *bargaining power* negara tersebut dalam konstelasi internasional. Semenjak itu pula kontestasi atas pengendalian kedua sumber daya utama ini dimulai. Berbagai perang memang terjadi dengan melibatkan alasan ini, dan sebaliknya sering pula terjadi, pemastian atas pengendalian sumber-sumber daya ini menjadi bagian dalam upaya mencapai supremasi dalam peperangan. Pada Perang Dunia II misalnya, Jepang berupaya penuh menguasai Asia Tenggara, khususnya Indonesia, guna mendapatkan sumber daya yang satu ini agar kemudian dapat menyuplai kebutuhan energi alat-

¹⁸ EHL-FORUM, No 5, Février 2005, Ecole Hôtelière de Lausanne (Switzerland), hlm. 3.

alat perangnya. Pada abad ini pula air menjadi salah satu sumber daya yang mulai dinilai amat krusial untuk dikuasai, sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah maupun Asia Selatan.

- b. upaya mengendalikan wilayah geografis. Upaya ini diperlukan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya. Misalnya adalah upaya perebutan kontrol atas selat (Selat Ormuz, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Malaka, Selat Bab-el-Mandab, hingga Selat Gibraltar), terusan (Suez dan Panama), serta jalur-jalur laut minyak melalui laut. Contoh lainnya adalah pertarungan memperebutkan kontrol atas beberapa wilayah di Timur Tengah memungkinkan negara yang terlibat mengendalikan sumber daya air: kendali atas dataran tinggi Golan memungkinkan Israel memenuhi kebutuhannya atas air. Turki mengendalikan sumber daya air di Tigris dan Eufrat, yang merupakan sumber air bagi Syiria and Irak.

Sementara itu penguasaan geografis, sebagaimana telah disampaikan di atas, adalah cara untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, dan ini berarti penguasaan geografis merupakan salah satu metode/cara yang umum digunakan untuk mencapai penguasaan atas sumber daya alam. Beberapa contoh yang diuraikan di atas sesungguhnya juga merupakan contoh upaya penguasaan geografis yang ditujukan untuk penguasaan sumber daya alam. Contoh lainnya adalah upaya Soviet pada masa Perang Dingin untuk menguasai negara-negara sekitarnya (khususnya Eropa Timur), yang pada hakikatnya adalah untuk memastikan kendali atas sumber minyak vital, seperti yang terjadi di Ukraina.

- c. upaya mewujudkan dominasi ideologis, identitas etnis maupun nasional. Bagaimanapun, suatu konflik dapat pula secara riil timbul akibat sentimen yang muncul pada suatu masyarakat yang sama, baik terkait dengan ide, orang-orang itu sendiri, bangsa, yang berarti adalah identitas kolektif, yang terlepas dari tinggi-

rendahnya semangat anggota kelompok sosial tersebut terhadap kelompoknya, ia tetap menganggap kelompok tersebut sebagai kelompok yang terbaik. Alasannya dapat didasarkan pada agama, misalnya. Hal ini merupakan sudut pandang yang biasa dimiliki oleh para integris, fundamentalis agama dari seluruh agama tanpa kecuali.

Berkenaan dengan identitas, suatu entitas dengan identitas tertentu sedikit banyak akan dipengaruhi oleh identitasnya tersebut dalam mengambil keputusan. Sejarah mencatat bahwa Perang Salib yang terjadi selama kurang-lebih 120 tahun pada abad 11 hingga 12, terlepas dari kemudian terdapat faktor-faktor lain yang lebih bersifat pragmatis seperti kekayaan Timur dan penguasaan Laut Tengah, dipicu oleh sentimen fanatisme keagamaan yang melanda seluruh Eropa Barat yang setidaknya melibatkan beberapa ratus ribu orang pada gelombang pertamanya saja (dari total 7 gelombang). Begitu pula misalnya dengan gerakan separatisme Moro di Filipina maupun Pattani di Thailand Selatan. Kedua gerakan itu, walau dalam skala yang lebih kecil ketimbang contoh sebelumnya, adalah gerakan yang didasarkan pada idealisme untuk menjalankan ajaran agama yang dianggap paling sesuai dengan kelompok yang bersangkutan, yang merasa menjadi minoritas di negara yang mayoritasnya memiliki identitas yang berbeda.

Teori tersebut akan penulis jabarkan dalam suatu variabel dan indikator yang diharapkan akan mempermudah proses operasionalisasi teori tersebut.

	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Geopolitik sebagai alat prediksi pemilihan kebijakan strategis aktor internasional	Ekonomi-Politik	Adanya upaya penguasaan sumber daya dari aktor internasional dalam suatu fenomena internasional	Kampanye Amerika Serikat terhadap Afghanistan meliputi upaya penguasaan sumber-sumber daya strategis Afghanistan,

			yakni minyak dan gas.
	Identitas (Budaya-Peradaban)	Adanya upaya penegakan dominasi identitas dari aktor internasional dalam suatu fenomena internasional	Amerika Serikat menyertakan unsur identitas termasuk nilai (demokrasi dan liberalisme), bahkan ”menyerempet” agama (<i>Crusade</i>) dalam kampanye ini. Tercipta citra bahwa peperangan ini adalah peperangan antara Barat melawan Islam, memicu respons dari masyarakat dunia Islam yang merasa sebagai korban, walaupun mereka bukan

			bagian dari Afghanistan yang diserang secara <i>de facto</i> .
--	--	--	---

I.6. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini telah terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai penyerangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak, yang akan dijabarkan pada bagian ini.

Pertama adalah tulisan Sundeep Waslekar yang berjudul *West and Islam: Beyond the Apparent Clash of Civilizations*. Dalam tulisannya ini Waslekar berargumen bahwa respons Amerika Serikat atas tragedi 11 September terhadap Afghanistan dan Irak menimbulkan respons sejenis oleh fundamentalis dan bahkan ekstrimis Islam. Ia meyakini bahwa konflik antar peradaban tidak pernah ada dan harus ditiadakan jika ada. Waslekar menilai sepanjang sejarah, konflik-konflik yang membawa identitas agama di permukaan bukanlah konflik agama, seperti dalam Perang Salib misalnya, di mana pasukan Salib sebenarnya tidak hanya menyerang muslim di Timur Tengah, tapi juga membantai Yahudi di Eropa Timur (Bizantium). Ia menutup penjabaran ini dengan argumennya “untuk mengatasi kekisruhan berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Barat dengan negara-negara Muslim, maka pertama kita harus meniadakan mitos *the Clash of Civilizations*. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya ia tidak mempercayai bahwa benturan yang dilatari oleh perbedaan identitas/budaya/peradaban pernah ada, dan semuanya hanya berlatar ekonomi-politik.¹⁹

¹⁹ http://www.strategicforesight.com/sfgnews_55.htm, diakses pada hari Selasa, 4 Februari 2009 pukul 17.00

Pandangan kedua yang sejalan dengan pandangan di atas adalah tulisan Anjar Nugroho yang didalamnya banyak mengutip perspektif Muhammad Abed al-Jabiri (1999.73), Guru Besar Filsafat dan Pemikiran Islam-Arab pada Muhammad V University Maroko. Sepanjang sejarah, menurut al-Jabiri, hubungan antar peradaban tidak bersifat konfrontatif, melainkan interpenetrasi. Bahkan konfrontasi dan konflik antar negara dalam peradaban yang sama lebih sering dan destruktif dibandingkan konfrontasi antar negara-negara dengan peradaban berbeda. Buktinya, dua kali perang dunia terjadi dalam peradaban Barat, disebabkan oleh konflik kepentingan (*conflict of interests*).

Kepentingan global Barat sesungguhnya adalah dominasi ekonomi dan politik atas seluruh negara non-Barat. Untuk melancarkan kepentingannya itu, Barat memakai banyak cara, dari yang paling halus sampai yang paling berdarah-darah. Cara halus Barat mengukuhkan hegemoninya diantaranya melalui rezim pengetahuan. Rezim pengetahuan yang diciptakan Barat tidak memberi ruang yang bebas kepada pengetahuan lain untuk berkembang. Generasi terdidik di negara berkembang diarahkan sedemikian rupa menjadi agen dan penjaga sistem pengetahuan Barat. Dan bukan hanya cara berfikir saja yang diarahkan, tetapi gaya hidupnya pun dikendalikan.²⁰

Uraian di atas kembali menunjukkan bahwa ia tidak meyakini bahwa peradaban adalah “sesuatu” yang mungkin berkonflik satu sama lain, dan lebih dari itu, identitas/budaya bukanlah faktor yang dapat menyebabkan konflik, namun ekonomi-politiklah yang menyebabkannya. Bagaimanapun, ia mengakui bahwa: “Apapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik, realitas dunia yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, dimana negara-negara berkembang – termasuk Muslim – adalah korbannya. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat jurang yang semakin lebar antara kelompok dominan dan yang didominasi. Dunia tentu tidak boleh terlalu lama dibiarkan terpolarisasi atas dua kelompok itu, di mana kelompok dominan sebagai the first class, bisa berbuat sewenang-wenang atas kelompok yang didominasi.”²¹ Hal tersebut hemat penulis menyiratkan kontradiksi, di mana di satu sisi ia begitu meyakini bahwa konflik antar peradaban adalah sesuatu yang

²⁰ *Ibid*

²¹ http://www.erasuslim.net/index.php?buka=show_artikel&id=823, diakses pada hari Selasa, 4 Februari 2009 pukul 21.00.

tidak pernah eksis sepanjang sejarah (yang seharusnya membuatnya tidak melakukan analisis secara makro – menggunakan istilah ‘peradaban’ seperti ‘Barat’ dan ‘Muslim’), namun di akhir tulisannya ia justru mengakui bahwa dunia Muslim sedang menjadi korban berat konflik rumit yang tengah terjadi di dunia saat ini. Selain itu pada salah satu bagian ia juga gagal memahami pandangan Huntington, ketika mengatakan bahwa “kesimpulan Huntington ternyata tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Dengan berakhirnya perang dingin, kecenderungan yang terjadi bukan pengelompokan masyarakat dalam entitas tertinggi – yaitu pengelompokan peradaban – tetapi justru perpecahan menuju entitas yang lebih kecil, berdasar suku dan etnik. Hal ini terlihat jelas dari disintegrasi Uni Soviet, yang sebagian besar penduduknya memiliki dasar budaya dan peradaban yang sama.

Kesamaan peradaban belum merupakan perekat yang cukup kuat bagi kelompok-kelompok etnik minoritas yang secara politik atau ekonomi merasa ditindas kelompok mayoritas yang berkuasa.” Pada kenyataannya, Huntington justru mengatakan bahwa setelah berakhirnya konflik ideologis, dunia akan terbagi-bagi secara lebih kuat dan dominan oleh identitas, yang dapat mewujudkan dalam bentuk etnis, agama, hingga dalam bentuknya yang terbesar, peradaban. Selain itu, patut ditekankan pula bahwa “benturan peradaban” yang dinyatakan Huntington tidaklah harus dalam bentuk seluruh komponen peradaban A melawan seluruh komponen peradaban B, namun “cukup” diwakili oleh *fault-lines*, yakni salah satu komponen (dapat berbentuk negara) melawan komponen lain dari peradaban yang berbeda. Pada titik ini penulis menyimpulkan bahwa kedua tulisan pertama ini bersifat deterministik dalam membaca faktor penyebab suatu konflik, khususnya terkait serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, yakni berdasarkan pada motif ekonomi-politik.

Sementara itu pandangan berlawanan terkait dengan konflik tersebut datang dari antara lain Petra Marquardt-Bigman. Dalam tulisannya yang berjudul *The Warped Mirror: The ‘Clash of Civilizations’*, ia menjelaskan betapa polling mengenai pemimpin paling dikagumi di dunia Arab pasca 11 September ada tiga orang, yakni pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah (nomor 1), presiden Syria Bashar al-Assad, dan yang ketiga, secara mengejutkan, adalah orang non-Arab, yakni Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Di sini ia menyimpulkan bahwa untuk memenangkan hati bangsa Arab,

maka seseorang 'tidak perlu' peduli dengan isu *well-governance*, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, kebebasan sipil maupun hak asasi manusia, namun cukup dengan satu kalimat: keberanian dalam menentang Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Ia kemudian menyimpulkan bahwa “ jika hal itu yang membuat seseorang populer di mata bangsa Arab, maka sesungguhnya apa yang dinamakan sebagai “benturan peradaban”, terlepas dari apakah itu “benar secara politik atau tidak”, adalah benar terjadi. Kesimpulan tersebut ditambah dengan penilaian bahwa fakta itu membuktikan bahwa ada yang salah dengan bangsa Arab.²²

Satu perspektif yang lebih “radikal” dalam arti mendukung pandangan identitas sebagai penentu konflik, termasuk dalam kasus invasi Amerika Serikat ke Afghanistan 2001 ditawarkan oleh Dr. Muhammad 'Abbas. Dalam tulisannya, *Laa, Bal Hiya al-Harb 'ala al-Islam* (Bukan, Tapi Perang terhadap Islam), ia dengan tegas menyatakan bahwa berbagai prediksi yang menyatakan bahwa perang ini dilatari oleh motif politik dan ekonomi, atau bahkan untuk mencari suatu kelompok (teroris) yang membahayakan kedamaian dunia adalah omong kosong belaka. Ini termasuk alasan resmi yang digunakan pemerintah Amerika Serikat ketika menyerang Afghanistan, yakni mencari kelompok teroris al-Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden. Semua argumen tersebut, menurutnya, adalah upaya penutupan hakikat konflik yang disembunyikan oleh para penguasa negara-negara yang bersangkutan. Ia mendukung argumennya tersebut dengan menjelaskan betapa selama ratusan tahun Barat memang telah memiliki sentimen negatif terhadap Islam disebabkan oleh pesatnya kemajuan Islam.²³ 'Abbas mendefinisikan Amerika sebagai representasi dari Barat, dan menurutnya hal itu tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya, Amerika Serikat selama ini kerap kali merasa seluruh sistem nilai seperti demokrasi dan liberalisme harus merujuk pada dirinya, dan merasa dirinya adalah contoh terbaik. Pada akhirnya 'Abbas menegaskan keyakinannya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Islam bukanlah sebuah perang

²² http://cgis.ipost.com/Blogs/Bigman/entry/the_clash_of_civilizations_posted , diakses pada hari Kamis, 6 Februari 2009 pukul 23.00.

²³ Dr. Muhammad 'Abbas. *Bukan, Tapi Perang terhadap Islam* (terj. Ibnu Bukhori). (Wacana Ilmiah Press: Solo, 2004), hlm. 257-258.

terhadap Taliban, melainkan merupakan satu mata rantai dari rangkaian besar peperangan terhadap Islam.²⁴

Dari sekian tulisan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa belum ada yang membahas konflik/serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan ini dengan perspektif yang multikausal. Semua pandangan di atas, baik yang menyetujui adanya konflik peradaban maupun tidak, pada dasarnya tetap berupaya mensintesis satu saja penyebab atas konflik yang terjadi sembari menegasikan adanya kemungkinan penyebab lainnya.

I.7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi, yakni penggunaan penelitian kuantitatif untuk mengetes kebenaran dari hasil temuan riset yang kualitatif, dan juga sebaliknya.²⁵ Dengan demikian, maka dalam metode ini data-data kualitatif akan dianalisis dengan metode kuantitatif.

Sementara itu sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang penulis dapatkan dari koleksi literatur, jurnal, serta situs internet yang relevan yang berasal dari Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional FISIP UI, Perpustakaan Center for Indonesian Reform, serta koleksi pribadi.

I.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam empat bagian:

1. Bab I adalah Bab Pendahuluan. Bagian ini terdiri Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Asumsi Penelitian, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II merupakan penjabaran dari proses serangan AS terhadap Afghanistan dan Iraq, serta bagaimana spekulasi berkembang atas motivasi di balik serangan-serangan tersebut. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab, yakni II.1. yang menjabarkan mengenai kronologis serangan dan alasan resmi Amerika Serikat,

²⁴ *Ibid*, hlm. 262.

²⁵ Kinanti Kusumawardani Taufik, Skripsi, *Aksiologi Ekofeminisme Liberal dalam Reflexive Modernization*. 2007.hlm. 28, disadur dari Alan Bryman, *Social Research Methods*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm.455.

- dan II.2. yang mengelaborasi interpretasi masyarakat internasional terhadap serangan tersebut. Sub-bab II.2. kemudian dilanjutkan oleh sub-bab II.3. yang menjelaskan pandangan berorientasi politik-ekonomi (dibagi menjadi II.3.1, yakni upaya memperebutkan tender penyaluran minyak dan gas Afghanistan, II.3.2. menceritakan lobi Amerika Serikat terhadap Taliban dalam Penyaluran Minyak dan Gas, II.3.2., Amerika Serikat, minyak dan persiapan invasi Afghanistan, II.3.4. Amerika Serikat dan Keamanan Energi, dan II.3.5. Project for the New American Century, dan II.3.6. beberapa permasalahan terkait pandangan berorientasi murni ekonomi-politik) serta II.4. yang menjelaskan pandangan berorientasi identitas/peradaban semata dalam memandang konflik tersebut (dibagi menjadi II.4.1. Huntington dan Benturan Peradaban, II.4.2. kampanye media Amerika Serikat terhadap Islam, II.4.3. permasalahan dalam pandangan berorientasi murni identitas/kultural).
3. BAB III merupakan bab yang menyajikan analisis alternatif, yakni analisis geopolitik kulturalis. Dalam bab ini dijabarkan sudut pandang alternatif dalam menganalisis konflik tersebut, tidak secara total memandangnya sebagai sebab-akibat kepentingan politik-ekonomi semata, namun tidak juga hanya berdasar peradaban. Dalam penjabaran ini akan digunakan teori geopolitik Prancis yang memandang ketiga hal tersebut (politik-ekonomi-peradaban/budaya/identitas) turut berperan dalam skalanya masing-masing. Bab ini dibagi menjadi sub-bab III.1. perspektif Amerika Serikat terhadap Islam dan pengaruhnya pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat, III.2. aspek identitas agama-kultural dalam hubungan internasional, III.3. pengaruh faktor identitas dalam proses pengambilan kebijakan, dan III.4. peran Israel dan sekutunya dalam pendefinisian citra Islam.
 4. Bab IV akan memberi analisis gabungan / kesimpulan dari semua bagian pendahulunya.